

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers
- Miru, Ahmadi. 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Nasution, A.Z. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media
- Nugroho, Susanti Adi. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana
- Poernomo, Bambang. 1992. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prayudi, 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Suatu Perjanjian Buku I. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 1996. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- _____. 2005. Percakapan Tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum. Bandung: CV. Purnama Bakti
- Siahaan, N.H.T. 2005. Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Pantai Rei
- Sidabalok, Janus. 2004. Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010
tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke dalam
Wilayah Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis
Kosmetika

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. 02001/SK/KBPOM
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik

C. Kepustakaan Lain

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 478/PID.Sus/2015/PN.Jmb